

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

Perkembangan ilmu politik dan kebijakan publik di Amerika Serikat seringkali dipengaruhi oleh figur-figur politik yang memiliki karakteristik unik. Salah satu tokoh yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah Donald J. Trump, yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang idiosinkratik. Dalam konteks ini, kebijakan "*Remain in Mexico*" yang diperkenalkan selama masa kepresidenan Trump menjadi salah satu contoh kebijakan yang mencerminkan pengaruh personalitas pemimpinnya terhadap implementasi kebijakan imigrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh idiosinkratik Donald Trump terhadap kebijakan "*Remain in Mexico*" dengan fokus pada bagaimana karakteristik pribadi dan gaya kepemimpinan Trump mempengaruhi formulasi dan penerapan kebijakan tersebut. Dalam Bab 1 ini, akan dijelaskan latar belakang pentingnya penelitian mengenai pengaruh pemimpin politik terhadap kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan imigrasi di Amerika Serikat. Selanjutnya, rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini akan diuraikan, diikuti oleh kerangka teoritik, hipotesis, tujuan, metode, jangkauan dan sistematika penelitian. Pada bagian akhir bab ini, struktur keseluruhan skripsi akan dipaparkan untuk memberikan panduan mengenai alur pembahasan yang akan disampaikan pada bab-bab berikutnya.

### **1.1. Latar Belakang**

Donald John Trump lahir pada tanggal 14 Juni 1946 di Queens, New York City. Donald Trump belajar di Sekolah Bisnis Wharton di University of Pennsylvania, lulus dengan gelar Bachelor of Science dalam bidang ekonomi pada tahun 1968. Setelah lulus, dia bergabung dengan bisnis real estate ayahnya, Fred Trump. Pada tahun 2015, Donald Trump mengumumkan pencalonannya sebagai calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat. Dia memenangkan nominasi partai tersebut dan kemudian memenangkan pemilihan presiden pada November 2016, mengalahkan calon dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Dia dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada tanggal 20 Januari 2017 (Donica, 2023).

Trump belajar di New York Military Academy sebelum akhirnya melanjutkan pendidikannya di Fordham University selama dua tahun. Setelah itu, ia pindah ke Wharton School of the University of Pennsylvania dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi pada

tahun 1968. Setelah menyelesaikan studinya, Trump memutuskan untuk bekerja di perusahaan real estate milik ayahnya, Elizabeth Trump & Son. Dia kemudian merubah nama perusahaan tersebut menjadi The Trump Organization. Dalam industri real estate, Trump segera menciptakan dampak besar dengan membangun atau mengambalalih beberapa properti terkenal di Manhattan seperti Trump Tower, Grand Hyatt Hotel, dan Wollman Rink yang ada di Central Park.

Sejak tahun 1980-an, Trump sudah menunjukkan ketertarikan dalam politik, tetapi ia benar-benar terjun ke dunia politik pada tahun 2015 dengan mengumumkan pencalonannya sebagai presiden dari Partai Republik. Kampanyenya lebih fokus pada isu-isu seperti imigrasi, perdagangan, dan kebijakan luar negeri, dengan slogan populer yang berbunyi "Membangkitkan Kejayaan Amerika" (MKKA). Tahun 2016 menjadi tahun yang mengejutkan bagi banyak orang ketika Trump berhasil memenangkan pemilihan presiden, mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Selama masa kepemimpinannya, banyak kontroversi dan perubahan kebijakan yang mencolok terjadi. Beberapa di antaranya adalah penarikan dari beberapa perjanjian internasional, pengkencangan imigrasi, serta reformasi pajak yang signifikan (McAdams, 2016).

Kepemimpinan Donald Trump memiliki banyak karakteristik yang membuatnya unik dan kontroversial dalam sejarah politik Amerika Serikat. Kuat dan percaya diri adalah karakteristik utamanya. Kemampuan Trump untuk berbicara di depan umum dengan penuh keyakinan dan mengambil keputusan tanpa keraguan adalah dua ciri khasnya. Dia sering memicu perdebatan karena cara berbicaranya yang langsung dan tanpa filter, tetapi penggunaan media sosialnya, terutama Twitter, memungkinkannya berbicara secara langsung dengan jutaan pendukungnya (Sahide, 2021).

Donald Trump sering digambarkan sebagai seorang pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, yang terlihat dari berbagai kebijakan dan retorikanya selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Bukti dari rasa nasionalisme yang tinggi ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan konkret yang telah dia buat serta cara Trump membingkai dirinya sebagai pembela kepentingan rakyat Amerika Serikat dalam setiap kesempatan. Amerika Serikat telah mengatasi imigran ilegal dari Meksiko dengan berbagai kebijakan imigrasi. Ini termasuk pengawasan perbatasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang lebih ketat, dan upaya untuk memperbaiki sistem imigrasi yang ada. Perdebatan politik yang intens terjadi di sekitar isu-isu ini (Seniwati, 2020).

Amerika Serikat (AS) adalah sebuah negara di benua Amerika Utara. Di sebelah timur, negara berbatasan dengan Samudra Atlantik, yang memiliki ribuan kilometer pantai, dan di sebelah barat, Samudra Pasifik, yang memiliki pantai yang panjang dan berbatu. Di sebelah timur, Alaska, yang terletak di bagian barat laut Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada. Amerika Serikat juga memiliki perbatasan yang panjang dengan Meksiko di bagian selatan, yang ditandai oleh beberapa bagian Sungai Rio Grande. Great Lakes dan pegunungan Rocky menandai perbatasan antara kedua negara. Karena keanekaragaman geografisnya, Amerika Serikat memiliki sumber daya alam dan lingkungan yang sangat beragam. Kondisi geografis ini juga berdampak pada iklim dan budaya di berbagai wilayah negara (Geost, 2020).

Amerika Serikat memiliki perekonomian yang maju dan berkembang pesat, yang menarik banyak imigran. Sektor-sektor ekonomi yang kuat, seperti layanan keuangan, teknologi, dan manufaktur, memiliki banyak peluang kerja dan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Amerika Serikat menarik banyak imigran karena budayanya yang beragam dan imigrannya yang sudah ada. Mereka mencari kesempatan untuk membangun karier, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan berkontribusi pada ekonomi yang berkembang pesat karena infrastruktur yang canggih, sistem pendidikan tinggi, dan inovasi teknologi.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Meksiko telah diwarnai oleh sejumlah faktor sejarah, politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Salah satu momen krusial dalam hubungan ini adalah penandatanganan Perjanjian North American Free Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 1994, yang menciptakan kawasan perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. NAFTA diharapkan akan membawa pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya tidak merata, dan banyak masyarakat luar Amerika Serikat masih menghadapi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat menghadapi meningkatnya masalah imigran ilegal. Beberapa faktor yang mendorong imigrasi ilegal ini termasuk kesempitan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan kekerasan terkait narkoba. Sebagai akibatnya, banyak warga mencari peluang yang lebih baik di Amerika Serikat, yang dianggap sebagai negara dengan tingkat hidup yang lebih tinggi di mana orang memiliki akses ke kebutuhan dasar dan sekunder kehidupan, serta menikmati kualitas hidup yang baik dan peluang ekonomi yang lebih besar (Council on Foreign Relations, 2023).

Perbatasan wilayah antarnegara memiliki potensi kejahatan yang sangat besar, seperti perdagangan manusia dan narkoba, dan yang paling umum, penyelundupan imigran. Jenis

kejahatan ini termasuk yang terjadi di perbatasan wilayah antara Amerika Serikat dan Meksiko. Penyelundupan migran lintas batas atau bahkan lintas benua adalah cara para pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan. Karena fakta bahwa kejahatan ini dilakukan di bawah tanah dan sulit untuk mengetahui kapan mereka dapat terjadi, menilai ukuran sebenarnya dari kejahatan ini sangat sulit (Siregar, 2020).

Daya tarik pendapatan yang tinggi, kondisi sosial dan politik yang stabil, dan kondisi geografis merupakan beberapa faktor yang mendorong orang untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri. Berbagai cara digunakan, bahkan jika mereka harus menempuh jalur ilegal, dan pemalsuan dokumen bahkan tanpa pelatihan dan keahlian yang tepat. Mereka menerima risiko kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi karena para pekerja mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka serta kesempatan berkembang bagi orang-orang di sekitar mereka. Cara tersebut disebut dengan migrasi internasional (Wahyuni, 2013). Migrasi merupakan perpindahan individu atau kelompok manusia dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap atau tinggal sementara di tempat baru. Migrasi dapat bersifat lokal, regional atau internasional dan tergantung pada berbagai faktor seperti faktor ekonomi, politik, sosial dan lingkungan (Dan, Wingkolatin, & Azmi, 2022).

Negara Meksiko, atau negara yang nama resminya adalah United Mexico States, adalah sebuah negara yang berlokasi di Amerika Utara. Negara ini merupakan negara terbesar ketiga di Amerika Latin. Menurut sejarah, nama Meksiko berasal dari nama ibu kota Aztec kuno, Mexico-Tenochtitlan. Kata "Mexi" berasal dari kata "Mexitli" yang merupakan nama dewa perang, sedangkan "Co" artinya tempat dan "ca" artinya orang. Meksiko terletak di benua Amerika, tepatnya di bagian selatan Amerika Utara dan berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Secara astronomis, Meksiko terletak di antara 6°-34° lintang utara dan 86°-118° bujur barat (Lestari, 2021).

Berbeda dengan gaya kepemimpinan Donald Trump, dalam membuat kebijakan Barack Obama lebih mempertimbangkan nasib para imigran tidak berdokumen atau imigran ilegal khususnya mereka yang memiliki keluarga atau anak-anak yang membutuhkan Pendidikan. Obama memandang imigran ilegal sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Ia juga menyadari bahwa banyak imigran ilegal yang masuk ke Amerika Serikat karena alasan ekonomi atau karena melarikan diri dari penganiayaan. Selanjutnya, Barack Obama juga mengedepankan Kerjasama dengan Meksiko dalam hal

keamanan perbatasan terutama mengenai imigran ilegal, serta kebijakan yang dibuat pun cenderung mudah diterima.

Contoh program yang dibuat pada masa pemerintahan Barack Obama adalah pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko membuat kesepakatan dalam bingkai Joint Declaration of 21st Century Border Management pada tahun 2010. Deklarasi tersebut mencakup kerja sama antara kedua negara dalam manajemen administrasi di wilayah perbatasan untuk meningkatkan birokrasi urusan imigrasi dan keamanan. Deklarasi ini dibuat karena pentingnya mempertahankan hubungan kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dan Meksiko karena posisi masing-masing negara sangat penting untuk satu sama lain. Kedua negara semakin tertarik untuk bekerja sama karena integrasi sosial yang disebabkan oleh banyaknya imigran Meksiko yang tinggal di Amerika Serikat dan integrasi ekonomi yang ditunjukkan oleh aktivitas perdagangan yang meningkat di wilayah perbatasan (Siregar, 2020).

Kebijakan "*Remain in Mexico*", atau juga dikenal dengan nama resminya Migrant Protection Protocols (MPP), adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2019 di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi jumlah imigran ilegal yang masuk ke Amerika Serikat. Hal ini terkait dengan isu imigrasi yang menjadi perhatian utama pemerintahan Trump. Kebijakan ini mengharuskan para imigran yang mengajukan permohonan suaka di Amerika Serikat untuk menunggu di Meksiko selama proses permohonan mereka sedang berlangsung. Kebijakan ini menuai kontroversi, baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat. Banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia, karena para pengungsi harus menunggu di negara yang tidak aman dan tidak memiliki akses ke layanan dasar.

Sebelum kesepakatan bersama antara Amerika Serikat dan Meksiko pada Juni 2019, MPP hanya beroperasi di tiga pelabuhan masuk: Tijuana-San Ysidro, Mexicali-Calexico, dan Ciudad Juárez-El Paso. Dalam sembilan puluh hari pertama setelah kedua negara menandatangani perjanjian, otoritas imigrasi Meksiko dapat menampung lebih banyak migran yang kembali dari Amerika Serikat ke negaranya. Kapasitas ini meningkat dari 100 migran menjadi 500 migran setiap hari di beberapa lokasi. Mereka juga setuju untuk memperluas program ke pelabuhan masuk Nuevo Laredo-Laredo dan Matamoros-

Brownsville. MPP beroperasi di Piedras Negras-Eagle Pass dan Nogales pada bulan Oktober dan November (Nadjihah, 2021).

Dalam program “*Migrant Protection Protocols*” (MPP) tentu menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif bagi Meksiko. Dampak-dampak positif bagi Meksiko yaitu, dengan menyetujui perjanjian kebijakan MPP oleh Amerika Serikat, Meksiko terlindung dari sanksi tarif impor yang akan diberlakukan oleh Donald Trump. Adapun dengan menyetujui perjanjian tersebut dapat mencegah perang dagang yang kemungkinan terjadi. Berikutnya, menjaga hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, mitra dagang terbesarnya dan negara tetangga utaranya.

Berikutnya terdapat berbagai dampak negatif bagi Meksiko dari perjanjian Kerjasama tersebut yaitu, Kota-kota perbatasan Meksiko seperti Tijuana dan Ciudad Juárez mengalami tekanan yang signifikan pada infrastruktur dan layanan publik mereka. Jumlah pencari suaka yang meningkat menyebabkan kekurangan ruang di tempat penampungan, rumah sakit, dan layanan sosial lainnya. Ekonomi lokal terpengaruh oleh kehadiran ribuan migran yang memerlukan dukungan, namun seringkali tidak memiliki sumber daya untuk berkontribusi secara positif terhadap ekonomi lokal. Kamp-kamp migran seringkali memiliki kondisi yang tidak memenuhi standar kesehatan dasar. Sanitasi, akses air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai adalah masalah besar yang meningkatkan resiko wabah penyakit.

Berbagai pihak menentang kebijakan “*Remain in Mexico*” atau Migrant Protection Protocols (MPP) yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump karena dampak negatifnya. Amnesty International, Human Rights Watch, dan American Civil Liberties Union (ACLU) adalah organisasi hak asasi manusia yang menentang kebijakan ini karena mereka mengutuk kondisi tidak layak yang dialami oleh pencari suaka yang terperangkap di kamp-kamp pengungsi di Meksiko. Banyak dari mereka menghadapi kesulitan dalam memperoleh makanan, air bersih, hunian yang layak dan perawatan kesehatan, hal ini dianggap melanggar hak asasi manusia serta keberlakuan martabat individu.

Pengacara dan advokat imigrasi juga menyoroti isu mengenai akses yang adil terhadap hukum bagi pencari suaka. Pencari suaka yang menunggu di Meksiko seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan bantuan hukum yang cukup, akibatnya peluang mereka untuk berhasil dalam proses suaka di Amerika Serikat menjadi berkurang. Praktik seperti itu dianggap melawan prinsip keadilan dan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum yang memadai.

Kebijakan ini membuat pemerintah Meksiko merasa khawatir dengan beban yang harus ditanggungnya sendiri. Kehadiran ribuan pencari suaka ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi stabilitas dan keamanan sosial di Meksiko, sehingga mereka harus ditampung. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan beban yang lebih besar bagi sumber daya dan layanan publik di negara tersebut, membuat situasi semakin sulit bagi penduduk lokal maupun mereka yang mencari perlindungan. Di Amerika Serikat, Partai Demokrat dengan tegas menolak kebijakan ini karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut terkait perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka. Dalam upaya untuk memperbaiki sistem imigrasi dan menerapkan prinsip kemanusiaan yang lebih baik, Presiden Joe Biden bekerja bersama dengan anggota partai lainnya untuk mencabut kebijakan ini.

Selain itu, beberapa hakim di Mahkamah Agung Amerika Serikat juga berpendapat bahwa kebijakan ini bisa jadi melanggar undang-undang imigrasi Amerika Serikat dan perjanjian internasional yang mengatur perlindungan bagi pengungsi. Dengan berbagai pengadilan memberikan putusan yang bervariasi, hal ini memperumit hukum terkait kebijakan ini serta menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahannya.

Melalui liputan yang meluas mengenai kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh pencari suaka di Meksiko, media dan LSM internasional turut memberikan tekanan kepada pemerintah Amerika Serikat agar mengubah kebijakan ini. Kritik internasional terhadap Amerika Serikat semakin meningkat dan citra global dalam hal perlindungan hak asasi manusia semakin memburuk akibat berita dan laporan mengenai kekerasan yang terjadi di kamp pengungsi.

Organisasi agama dan komunitas keagamaan juga menolak keras kebijakan ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip moral serta etika agama, khususnya dalam hal melindungi para kaum terpinggirkan. Gereja-gereja dan organisasi keagamaan berbondong-bondong mengeluarkan pernyataan publik menentang kebijakan ini serta memberikan bantuan langsung kepada pencari suaka yang terdampak.

Secara keseluruhan, kekhawatiran yang mendalam tentang dampak kemanusiaan, keadilan hukum, dan stabilitas sosial terkait dengan kebijakan "*Remain in Mexico*" tercermin dalam penentangan tersebut (Cordonean, 2023).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Mengapa Donald Trump mengambil kebijakan luar negeri “*Remain in Mexico*” dalam menangani isu imigran ilegal?”

## **1.3. Kerangka Teoritik**

William D Coplin mengatakan bahwa ada tiga faktor penting yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta peranan konteks internasional yang menunjukkan posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain. Teori ini berfokus pada proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan berusaha untuk menjelaskan bagaimana faktor domestik dan internasional mempengaruhi proses tersebut (Bahri, 2021).

Untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah, penulis menggunakan teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang lebih berfokus pada faktor politik dalam negeri. Faktor politik dalam negeri merupakan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri. Salah satu aktor dalam faktor tersebut adalah pemimpin suatu negara, seperti presiden, perdana menteri, atau raja. Untuk menjelaskan lebih lanjut, penulis menggunakan model teori idiosinkratik.

### **1.3.1 Model Teori Idiosinkratik**

Kata "idiosinkratik" berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata utama, yaitu "idios" yang berarti "unik" atau "khusus bagi individu tertentu", dan "synkrisis" yang berarti "campuran" atau "kombinasi elemen". Secara historis, istilah ini merujuk pada campuran sifat-sifat atau karakteristik yang khas pada individu. Dalam konteks filosofis, idiosinkratik menggambarkan cara seseorang berpikir, bertindak, atau membuat keputusan yang sangat dipengaruhi oleh keunikan pribadinya. Ini berbeda dengan pendekatan yang didasarkan pada norma-norma umum atau prinsip-prinsip universal. Filosofi idiosinkratik menekankan bahwa setiap individu memiliki campuran karakteristik yang unik, yang membentuk cara mereka memahami dunia dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Dalam dunia politik, seorang pemimpin yang idiosinkratik mungkin membuat keputusan berdasarkan kepribadian, pengalaman, atau keyakinan pribadi yang berbeda dari kebiasaan atau harapan yang umum. Pendekatan ini sering kali menghasilkan tindakan yang tidak dapat diprediksi, mencerminkan kompleksitas dan kedalaman keunikan manusia.

Teori idiosinkratik menekankan pada karakteristik yang dimiliki individu ketika mengambil keputusan. Teori ini menekankan bahwa individu sebagai pengambil keputusan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam proses pengambilan keputusan politik. Idiosinkratik melekat pada suatu citra, persepsi, image dan karakteristik pembuat keputusan. Pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara bergantung pada karakteristik pribadi para pemimpin politik yang berpengaruh. Pemimpin politik dapat mempengaruhi pemerintah menuju hubungan yang agresif atau damai dengan negara lain. Individu dapat menghubungkan motivasinya dengan lingkungan politik atau politik disekitarnya, yang memerlukan informasi untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan individu dapat diidentifikasi berdasarkan kepribadiannya: gaya kepemimpinan politik, penggunaan penasihat, dan pola pemrosesan informasi dalam kelompok pengambilan keputusan.

Salah satu tokoh yang menjelaskan tentang teori idiosinkratik adalah Alex Mintz. Alex Mintz merupakan seorang ilmuwan politik yang terkenal dengan pencapaian luar biasa di bidang pengambilan keputusan dalam politik, khususnya dalam kerangka teori idiosinkrasi. Mintz dikenal melalui karya-karyanya yang berusaha memasukkan faktor-faktor psikologis dan idiosinkratik dalam pengambilan keputusan politik, yang sering didekati dengan model eksperimental. Ketertarikannya diarahkan pada bagaimana keputusan politik diambil dengan mempertimbangkan hubungan antara kepribadian dengan ketersediaan informasi dan analisis.

Dalam buku berjudul “*Understanding Foreign Policy Decision Making*” yang ditulis bersama oleh Alex Mintz dan Karl DeRouin Jr. pada tahun 2010, Alex Mintz menjelaskan tiga indikator penting yang ia sertakan dalam model analisa idiosinkratik, yaitu:

1) **Kepribadian Pemimpin (*Leader's Personality*)**

David Winter mendefinisikan kepribadian seseorang sebagai integrasi proses persepsi, ingatan, penilaian, pengejaran tujuan, serta ekspresi dan regulasi emosional yang terstruktur secara individual. Dan bahkan ketika berhadapan dengan emosi, karakter membentuk siapa individu tersebut. Menurut David Winter, ini adalah empat elemen penting dari kepribadian seseorang, ini dikategorikan ke dalam temperamen, atau elemen perilaku yang dapat diamati seperti tingkat energi dan neurotisme,

sedangkan konteks sosial adalah serangkaian faktor: gender, kelas, ras, budaya, etnis, serta generasi dan kognisi, yaitu semua faktor yang berkaitan dengan keyakinan, nilai, perilaku dan motivasi, terutama tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme pertahanan.

## 2) **Gaya Kepemimpinan (*Leadership Style*)**

Menganalisis gaya kepemimpinan presiden suatu negara dapat membantu kita lebih memahami mengapa keputusan tertentu dibuat oleh pemimpin tersebut dan mengapa tindakan alternatif tidak diambil. Alex Mintz mengategorikan gaya kepemimpinan yang berbeda sebagai berikut:

### a. **Goal-driven vs Context-driven**

Goal-driven cenderung lebih memahami hambatan-hambatan yang mungkin mereka hadapi ketika mengambil keputusan kebijakan luar negeri. Secara umum, pemimpin yang berorientasi pada tujuan tidak mudah menerima informasi baru, sedangkan pemimpin context-driven cenderung mencari informasi baru.

### b. **Task-oriented vs Task-motivated**

Gaya kepemimpinan task-oriented tidak mungkin mengubah ideologi atau posisi mereka. Dengan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, posisi dan ideologi cenderung tidak berubah. Sebaliknya, para pemimpin task-motivated cenderung tidak memerlukan koalisi internasional atau nasional yang luas sebelum mengambil tindakan dan mempertahankan kebijakan.

### c. **Task-oriented vs Context-Oriented**

Task-oriented vs context-oriented, memiliki perbedaan yang dianggap signifikan yaitu kapasitas sensitivitas terhadap konteks politik. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan task-oriented kurang sensitif terhadap situasi politik, berbeda dengan dengan gaya kepemimpinan context-oriented. Dalam menganalisa gaya kepemimpinan task-oriented dan context-oriented, dapat dilihat dengan a) apakah pemimpin menerima kendala politik; b) keinginan pemimpin untuk menerima informasi baru; dan c) apakah pemimpin berorientasi pada masalah atau berorientasi pada hubungan.

### 3) Tipe-tipe Pemimpin

#### a) *Crusader*

Pemimpin yang menantang batasan politik namun tidak terbuka akan informasi-informasi baru. Tipe pemimpin seperti ini pada dasarnya tidak membatasi dirinya untuk mengejar visinya sendiri mengenai dunia. Tipe pemimpin crusader terbagi menjadi dua tipe yaitu expansionist dan evangelist. Expansionist adalah mereka yang tidak mau kehilangan kendali. Mereka menginginkan kontrol yang lebih besar (high need for power), kurang mampu memiliki banyak pilihan dalam pengambilan keputusan (low conceptual complexity), dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat terhadap negaranya (high nationalism), tidak peduli dengan arti pertemanan (low need for affiliation). Sedangkan evangelist merupakan mereka yang merasa lebih nyaman untuk terlibat dan mempengaruhi tujuan mereka dengan cara yang serupa dengan gaya yang dilakukan oleh mereka yang memberitakan Injil seperti para evangelist.

#### b) *Strategic*

Pemimpin strategic mempunyai kecenderungan untuk mendobrak batasan, namun terbuka terhadap informasi. Pemimpin tipe ini tahu apa yang mereka inginkan dan meminta informasi untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Meski berani secara politik, ia tetap berhati-hati dalam mencapai tujuan ambisiusnya.

#### c) *Incremental*

Seorang pemimpin menghadapi permasalahan dan kendala yang sulit, namun tetap terbuka terhadap informasi (dan karena itu bersifat strategis), dan dalam hal motivasi, difokuskan pada manuver.

#### d) *Charismatic*

Pemimpin charismatic menginginkan hubungan dan kendala-kendala serta terbuka terhadap informasi (termasuk informasi strategis), namun jika

menyangkut motivasi, mereka fokus pada hubungan dengan mendorong orang lain untuk mengambil tindakan.

e) *Pragmatic*

Seorang pemimpin yang menghargai tantangan politik tetapi tertutup terhadap informasi-informasi. Dalam kategori pragmatic, ada empat kategori tambahan, yaitu:

- *Directive* dan *Consultative*

Kedua tipe ini menghormati batas-batas politik, namun tertutup terhadap informasi yang mereka terima. Para aktor ini cenderung mengarahkan diskusi politik sejalan dengan pandangan pribadi mereka. Salah satu ciri seorang directive adalah fokusnya pada masalah ketika menghadapi tantangan politik. Sebaliknya, pemimpin consultative lebih fokus pada hubungan dan memantau secara dekat posisi elit lainnya.

- *Reactive* dan *Accommodative*

Kesamaan yang dimiliki kedua tipe ini adalah mereka menghormati batasan dan terbuka terhadap informasi, namun memiliki motivasi berbeda dalam tindakannya. Pemimpin tipe reactive cenderung fokus pada masalah yang muncul dan bijaksana dalam mengambil keputusan kebijakan luar negeri. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi pilihan-pilihan yang berbeda dan menanyakan apakah pemilih politik akan menerimanya. Masalah apa pun yang timbul akan diselesaikan dengan mempertimbangkan opsi-opsi yang memenuhi syarat politik. Sebaliknya, tipe accommodative berfokus pada membangun hubungan baik dengan negara lain, atau yang biasa dikenal dengan istilah "*bridge-builders*" yang berupaya membangun konsensus dan memperkuat akuntabilitas.

Berdasarkan karakternya yang menantang batasan-batasan politik, Donald Trump dapat dikategorikan sebagai pemimpin tipe crusader. Donald Trump memiliki visi yang kuat untuk Amerika Serikat, yaitu menjadikannya sebagai negara yang lebih kuat dan sejahtera. Donald Trump tidak pernah takut untuk mengambil risiko untuk mencapai tujuannya. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Selain itu, Donald Trump memiliki kepribadian yang karismatik dan mampu memotivasi pengikutnya. Hal tersebut terlihat dari kemampuannya untuk memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat meskipun tidak memiliki pengalaman politik yang luas. Trump juga mampu menggerakkan massa pendukungnya untuk mengikuti agenda politiknya.

Tipe kepemimpinan adalah komponen penting. Salah satu contohnya adalah ketika Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, sifat pribadinya, termasuk retorika yang keras dan pendekatan tegas terhadap masalah tertentu, berdampak besar pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Seperti pada 30 Mei 2019, pernyataan Trump dimulai dengan kalimat berikut:

*“As everyone knows, the United States of America has been invaded by hundreds of thousands of people coming through Mexico and entering our country illegally.” (Seperti yang semua orang tahu, Amerika Serikat telah diserbu oleh ratusan ribu orang yang datang melalui Meksiko dan memasuki negara kita secara ilegal.)*

*“This sustained influx of illegal aliens has profound consequences on every aspect of our national life — overwhelming our schools, overcrowding our hospitals, draining our welfare system, and causing untold amounts of crime, it must end NOW!” (Masuknya orang asing ilegal yang berkelanjutan ini memiliki konsekuensi besar pada setiap aspek kehidupan nasional kita - membanjiri sekolah-sekolah kita, membuat rumah sakit kita penuh sesak, menguras sistem kesejahteraan kita, dan menyebabkan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, Ini harus diakhiri SEKARANG!)*

Selama jabatannya sebagai presiden, Donald Trump memperkenalkan sejumlah kebijakan keras terhadap imigran ilegal. Adapun salah satu program yang dibuat oleh Donald Trump yaitu program *“Remain in Mexico”*. Di bawah kebijakan *“Remain in Mexico”*, individu yang mencari suaka melalui perbatasan darat antara Amerika Serikat dan Meksiko (baik di dalam dan di luar pos masuk resmi (POE)) yang melewati pemeriksaan ketakutan yang dapat dipercaya oleh petugas suaka Amerika Serikat dikembalikan ke Meksiko untuk

menunggu sidang suaka mereka di pengadilan imigrasi Amerika Serikat (Upaningtyas, Putri, & Parameswari, 2022).

Hubungan Amerika Serikat dengan Meksiko sering dipengaruhi oleh retorika tegas Trump dan pendekatan kerasnya terhadap imigrasi ilegal. Oleh karena itu, tipe kepemimpinannya sangat memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama dalam hal imigrasi ilegal. Pandangan dan prinsip pribadi Trump tentang masalah ini membentuk kebijakan-kebijakan tersebut, yang berdampak pada tingkat diplomatik dan hubungan internasional antara Amerika Serikat dan Meksiko, serta memengaruhi perdebatan di antara keduanya (Saputra, 2022).

#### **1.4. Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan serta kerangka teori yang digunakan diatas, maka faktor yang mendasari Donald Trump mengambil kebijakan “*Remain in Mexico*” adalah:

1. Karakteristik idiosinkratik Donald Trump sebagai seorang pemimpin dengan tipe crusader secara signifikan memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan ‘*Remain in Mexico*’. Sikapnya yang agresif, visioner, dan berorientasi pada hasil menyebabkan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan fokus pada pengurangan imigrasi ilegal melalui pendekatan yang tegas dan kontroversial, berbeda dari pendekatan administrasi sebelumnya.

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menjabarkan, dan menganalisis tentang idiosinkratik Donald Trump dalam mengambil Kebijakan Luar Negeri “*Remain in Mexico*” dalam menangani isu imigran ilegal. Selain itu, penulis berusaha menjawab pertanyaan pada rumusan masalah berdasarkan pada teori yang digunakan dan dipaparkan data yang akurat.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang berusaha untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan cara menciptakan gambaran yang lengkap dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan perspektif rinci yang diperoleh dari sumber informasi dan dilakukan dalam konteks yang alami. Oleh karena itu, bukan seperti yang dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah manusia dan sosial. karena

peneliti memahami bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungannya dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi tindakan mereka. Studi dilakukan di latar yang alamiah, bukan sebagai akibat dari perlakuan atau manipulasi variabel (Fadli, 2021).

Pada metode pendekatan kualitatif ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder tersebut berasal dari sumber-sumber yang telah ada, bukan dari pengumpulan data secara langsung oleh penulis. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang dapat mencakup mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen pemerintah, dan materi lainnya yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini.

### **1.7. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor idiosinkratik Donald Trump terhadap kebijakan luar negeri “*Remain in Mexico*”. Jangkauan penelitian pada penelitian ini penulis meninjau isu tersebut dari Tahun 2018-2021.

### **1.8. Sistematika Penelitian**

BAB I, berisikan pendahuluan. Pertama, latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa topik yang diteliti penting dan relevan untuk dikaji. Kemudian terdapat rumusan masalah, di dalamnya mengidentifikasi permasalahan yang akan diselesaikan melalui penelitian. Pada bagian ini, penulis menyajikan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama dalam skripsi. Selanjutnya kerangka teori yang membantu menyediakan landasan konseptual yang kokoh untuk penelitian yang dilakukan. Dengan merujuk pada teori-teori yang relevan, penulis dapat membangun kerangka pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan konteksnya. Berikutnya terdapat hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, dimulai dari membahas dinamika imigrasi di Amerika Serikat hingga terbentuknya program Protokol Perlindungan Migran (MPP) yang biasa disebut kebijakan “*Remain in Mexico*” dengan membahas lebih lanjut terkait faktor idiosinkratik di studi terdahulu presiden-presiden Amerika Serikat.

BAB III, membahas lebih lanjut terkait faktor idiosinkratik yaitu tipe kepemimpinan crusader Donald Trump dalam mengambil kebijakan luar negeri “*Remain in Mexico*” menggunakan model teori idiosinkratik.

BAB IV, berisikan kesimpulan.